



BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2010 dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan siklus perencanaan. Proses perencanaan dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. Proses ini telah menghasilkan perencanaan yang komprehensif, mengakomodasi berbagai kepentingan dari para pihak, berbagai sektor dan sasaran yang bermuara pada satu tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Musrenbang tersebut menghasilkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten dan masyarakat. Usulan program dan kegiatan tersebut dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA dan PPAS. Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.



Secara ringkas Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Isu – isu strategis

Tahun 2010 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir berlakunya RPJMD Kabupaten Sleman yaitu tahun 2005 – 2010, isu – isu strategis yang menjadi persoalan daerah antara lain meliputi :

- a. Tingginya angka kemiskinan dan masih banyaknya penduduk yang rentan terhadap berbagai permasalahan sosial
- b. Penciptaan kesempatan kerja yang belum sebanding dengan besarnya tingkat pertumbuhan angkatan kerja dan pencari kerja
- c. Belum optimalnya peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan
- d. Struktur dan kondisi perekonomian makro daerah belum sepenuhnya mampu mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- e. Belum optimalnya pelayanan publik sebagai perwujudan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
- f. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana daerah
- g. Kondisi keamanan dan ketertiban relatif belum kondusif

2. Permasalahan

Dalam mewujudkan transformasi dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang lebih baik, bukan merupakan hal yang mudah. Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- a. Kapasitas Pemerintah Daerah Belum Optimal, dalam hal :
 - 1) Kualitas SDM aparat
 - 2) Efisiensi Birokrasi
 - 3) Kualitas Pelayanan Publik
 - 4) Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
- b. Partisipasi masih perlu dikembangkan (dalam perencanaan dan kebijakan daerah, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan).
- c. Belum tertibnya pengelolaan arsip dilingkungan OPD Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mendukung terselenggaranya tata pemerintahan yang baik.



- d. Pengelolaan data dan informasi belum memadai
- e. Pemberdayaan dan alih teknologi terapan di masyarakat belum optimal.
- f. Gangguan ketentraman, ketertiban, dan keamanan, cenderung meningkat.
- g. Nilai-nilai nasionalisme dan semangat kebangsaan belum mantap
- h. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang berdampak pada penyediaan pangan
- i. Produksi dan produktivitas tanaman belum optimal
- j. Rendahnya inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan desain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk
- k. Terbatasnya jaringan pasar industri kecil dan kurangnya kemitraan dalam usaha pemasaran
- l. Masih rendahnya akses modal, kualitas produk, dan akses pasar bagi UMKM
- m. Penambangan BGGC dan pengambilan air tanah yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan
- n. Kasus pencemaran/perusakan lingkungan naik 20 % (20 menjadi 25)
- o. Pelanggaran pemanfaatan tata ruang masih cukup banyak.
- p. Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan dan kepemilikan tanah belum optimal.
- q. Kualitas dan kuantitas air tanah dan kualitas udara mengalami degradasi.
- r. Pelayanan persampahan belum mencakup semua wilayah perkotaan.
- s. Kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati menurun.
- t. Prasarana jalan Rusak sedang : 419,95 km (38,70%) dan Rusak berat : 350,85 km (32,33%)
- u. Prasarana Jembatan Rusak Sedang : 119 unit (26,38 %) dan Rusak berat : 75 unit (16,63 %)
- v. Kawasan rawan genangan 42 lokasi, kawasan kumuh 17 lokasi, rumah tidak layak 13.284 unit.
- w. Prasarana dan sarana irigasi berupa bendung rusak 26 % dan



- x. saluran irigasi rusak 31 %
- y. Kondisi prasarana dan sarana permukiman dan perumahan belum memadai.
- z. Kondisi gedung pelayanan umum belum seluruhnya memadai.
- aa. Kondisi prasarana dan sarana irigasi dan sumber daya air belum semua memadai.
- bb. Kondisi sarana dan prasarana penanganan bencana belum memadai.
- cc. Kualitas pelayanan kesehatan belum optimal
- dd. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat belum optimal
- ee. Penderita penyakit degeneratif meningkat.
- ff. Pengelolaan potensi ODTW dan pemasaran pariwisata belum optimal
- gg. Pelestarian seni tradisional, nilai-nilai luhur dan benda cagar budaya belum optimal.
- hh. Kurangnya minat masyarakat dalam mengelola dan melestarikan keragaman budaya.
- ii. Terdapat 20.622 (33,60%) anak usia 3-6 tahun dari 61.363 anak yang belum terlayani dalam lembaga PAUD dan TK
- jj. Masih terdapatnya anak putus sekolah SD/MI=37 orang, SMP/MTs 66 orang, SMA/SMK/MA 124 orang.
- kk. Pendidik yg belum memenuhi standar kualifikasi SI/DIV cukup tinggi SD 84,17%, SMP 39,64%, SMA/SMK 14,03%
- ll. Fasilitas sarana dan prasarana pada sekolah dasar banyak yang belum memenuhi standar
- mm. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman masih cukup besar yaitu sekitar 56.867 KK (22,25%).
- nn. Angka pengangguran masih tinggi 40.468 orang (6,96%)
- oo. Kualifikasi dan kompetensi calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja.
- pp. Masih rendahnya kualitas hidup dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).